
**RENCANA
KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2025**



KOTA BEKASI

**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK KOTA
BEKASI**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini menjadi faktor mendasar dalam mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, transisi arah kebijakan dari RPD 2024-2026 ke dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 menjadi penting, terutama mengingat adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 harus mencerminkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Semua kebijakan, program, sasaran, dan kegiatan yang dilaksanakan harus sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sekaligus mengedepankan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Rencana Kerja tidak hanya memenuhi target pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kohesi sosial di Kota Bekasi.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025, dimana target dan indikator sasaran yang telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2025. Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja Perubahan ini.

Bekasi,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 197407081200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB II	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB III	10
EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	10
2.1 Evaluasi RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	10
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12
2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	17
BAB IV	28
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI	28
BAB V	42
PENUTUP	42
A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan	42
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	42
C. Rencana Tindak Lanjut.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 sampai dengan Triwulan II Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.....	11
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.....	11
Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.....	18
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data juni 2025).....	30
Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD	3
Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov.....	3
Gambar 3. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunanm Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun kedua periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Bekasi tahun 2025, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

RENJA PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA PD berfungsi menjabarkan RENSTRA ke dalam Rencana Operasional yang memuat arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Program Kegiatan PD.

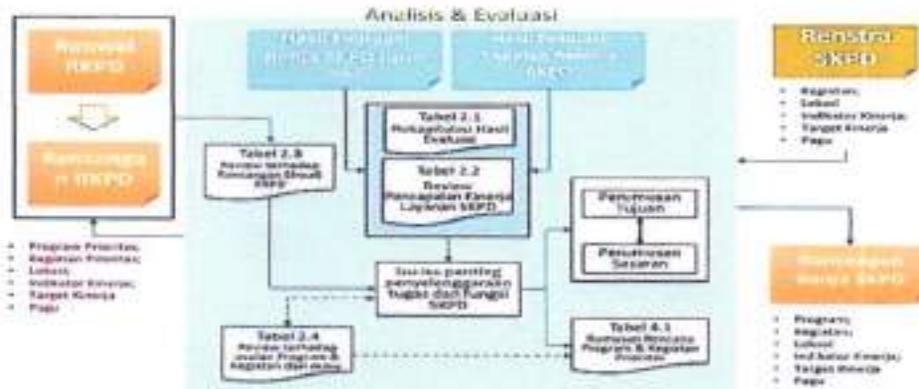
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (*Inpres*) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta mewujudkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diimplementasinya oleh Bakesbangpol Kota Bekasi. Badan Kesbangpol Bekasi sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang telah menyusun Dokumen Perencanaan untuk 5 (*lima*) Tahun yaitu Rancangan Akhir Rencana Strategis (*RENSTRA*) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk menggambarkan wujud pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2025 Badan Kesbangpol tersebut kemudian disatukan dengan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah lain dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi untuk dibahas ke dalam Pra Musrenbang Kota Bekasi. Dalam forum ini terjadi proses telaah analitik mengenai daftar program dan kegiatan RKPD untuk disempurnakan. RKPD yang telah disempurnakan tersebut kemudian dibawa ke dalam forum Musrenbang tingkat Kota Bekasi untuk disahkan dalam bentuk penandatanganan berita acara Musrenbang. Hasil dari Musrenbang tingkat Kota ini merupakan finalisasi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah. Proses Penyusunan RENJA dilakukan dalam rangkaian Penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan Penyusunan RENJA berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD
(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, Penyusunan RENJA dilakukan melalui Tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal RENJA, Penyusunan Rancangan RENJA, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir RENJA, hingga Penetapan RENJA. Dalam pelaksanaan Tahun berjalan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan karena adanya perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025. Selanjutnya perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov



Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pemantauan situasi kondisi daerah (SIKONDA) dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
- Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;

Landasan operasional, terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 129 Tahun 2021 Seri D);

27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
28. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 060/752/SETDA.Org tanggal 06 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi. Perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor ... Tahun 2025, tanggal ... Agustus 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
- b. Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 :
Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:
 1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2025 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
 2. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2025;
 3. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
 4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external

organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **BAB I adalah PENDAHULUAN.**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi, proses penyusunan RENJA, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen RKPD, RENSTRA, dengan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. **BAB II adalah EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;

3. **BAB III adalah RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI.**

Pada bagian ini berisikan tabel perubahan rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.

4. BAB IV adalah PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2025****2.1 Evaluasi RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan
Triwulan II Tahun 2025**

Kegiatan *Review* hasil pelaksanaan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama tahun berkenaan yaitu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan 6 (*Enam*) program, yang terdiri dari 12 (*Dua belas*) kegiatan dan 28 (*Dua puluh delapan*) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.46.615.263.760,- (*Empat puluh enam milyar enam ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

Hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. 1 sampai dengan Triwulan II Hasil Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025**

Kode Rekr	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fiask (%)	Anggaran (%)	Fiask (%)	Anggaran (%)	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Target	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	13.535.520.760	25%	25%	50%	50%	
			Realisasi	1. 50% 2. 50% 3. 50% 4. 50%		25%	25%	50%	50%	
			Target	100 %		16%	89%	54	93%	
			Realisasi	50%		15%	0%	36%	0%	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target	1 Dokumen	150.000.000	15%	100%	53%	100%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target	1 Laporan	25.000.000	25%	26%	50%	52%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Dokumen		15%	0%	35%	0%	
			Target	1 Laporan		25%	26%	50%	52%	
			Realisasi	0 Laporan		15%	0%	40%	0%	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	Target	100 %	10.469.513.000	25%	25%	50%	53%	
			Realisasi	50%		25%	21%	50%	47%	
			Target	1064 Orang/bulan		25%	25%	50%	53%	
			Realisasi	468 Orang/bulan		25%	21%	50%	47%	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Target	468 Orang/bulan	10.454.513.000	25%	21%	50%	47%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Flisk (%)	Anggaran (%)	Flisk (%)	Anggaran (%)	
										Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target	18 Laporan	15.000.000	25%	27%	50%	51%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target	100 %	500.000.000	5%	90%	9%	94%	
			Realisasi	50%		0%	0%	0%	0%	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Target	50 Paket	200.000.000	0%	100%	0%	100%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Paket		0%	0%	0%	0%	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Target	12 Orang	50.000.000	25%	44%	50%	67%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	0 Orang		0%	0%	0%	0%	
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Target	52 Orang	250.000.000	0%	0%	0%	0%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
			Realisasi	0 Orang		0%	0%	0%	0%	Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target Realisasi	100 % 50%	1.075.000.000	23% 2%	56% 0%	72% 0%		Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Target	3 Paket	350.000.000	20%	86%	50%	91%	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	Target	12 Paket	75.000.000	25%	58%	50%	100%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Target	2 Dokumen	50.000.000	25%	25%	50%	50%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Target	12 Laporan	150.000.000	25%	25%	50%	50%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
			Realisasi	6 Laporan		15%	0%	45%	0%	Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Target	12 Laporan		25%	30%	50%	56%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Realisasi	6 Laporan	350.000.000	0%	0%	0%	0%	Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Target	12 Dokumen		25%	100%	50%	100%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Realisasi	6 Laporan	100.000.000	0%	0%	0%	0%	Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Target	100 %		0%	0%	0%	0%	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi	0%	300.000.000	0%	0%	0%	0%	
			Target	23 Unit		0%	0%	0%	0%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Realisasi	0 Unit	300.000.000	0%	0%	0%	0%	Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Target	100 %		25%	35%	50%	59%	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi	50%	516.007.760	25%	20%	50%	44%	
			Target	100 %		25%	20%	50%	44%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW 1		TW 2		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fiask (%)	Anggaran (%)	Fiask (%)	Anggaran (%)	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Target	12 Laporan	516.007.760	25%	35%	50%	59%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	6 Laporan		25%	20%	50%	44%	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target	100 %	500.000.000	17%	30%	50%	59%	
			Realisasi	50%		0%	0%	33%	25%	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Target	22 Unit	400.000.000	33%	15%	50%	60%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	7 Unit		0%	0%	35%	30%	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Target	25 Unit	100.000.000	18%	25%	50%	54%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
			Realisasi	8 Unit		0%	0%	25%	0%	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Target	100 %	2.812.569.800	12%	8%	33.04%	58%	
			Realisasi	50%		0%	0%	0%	1%	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Target	1. 200 Orang 2. 354 Orang 3. 2 Dokumen 4. 52 Orang	2.812.569.800	12%	8%	0%	58%	
			Realisasi	1. 0 Orang 2. 0 Orang 3. 0		0%	2%	0%	1%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi / Dokumen		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
8.01.02.2.01.0003	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3. Terlaksananya pembinaan aktivitas kepasakibrakan dan purnapasakibraka 4. Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Target 200 Orang	Dokumen 4. 52 Orang	896.130.000	0%	0%	0%	93%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Target 354 Orang	0 Orang	580.940.500	0%	0%	0%	0%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepasakibrakan dan purnapasakibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas kepasakibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapasakibraka	Target 2 Dokumen	0 Dokumen	181.762.000	0%	0%	0%	0%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pembinaan terhadap aktivitas

Kode Rekr	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Pasakibraka	Jumlah Pasakibraka	Target 52 Orang	Realisasi 52 Orang	1.153.737.300	15%	0%	40%	51%	kepaksaibrakan dan Purnapaskaibraka sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Target 100 %	Realisasi 50%	1.400.000.000	0%	0%	0%	0%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Pembentukan Pasakibraka sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Target 1900 Orang	Realisasi 0 Orang	1.400.000.000	0%	0%	0%	0%	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Target 1900 Orang	Realisasi 0 Orang	1.400.000.000	0%	0%	0%	0%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	Target 100 %	Realisasi 50%	3.887.400.000	22%	34%	45%	65%	
						22%	8%	45%	21%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
8.01.06.2.01	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<p>1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>2. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>3. Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	Target	<p>1. 250 Orang</p> <p>2. 12 Laporan</p> <p>3. 12 Dokumen</p>	3.837.400.000	22%	34%	45%	65%	
			Realisasi	<p>1. 0 Orang</p> <p>2. 6 Laporan</p> <p>3. 6 Dokumen</p>		22%	8%	45%	21%	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	Target	250 Orang	845.200.000	0%	13%	0%	13%	<p>Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan</p>
			Realisasi			0%	0%	0%	0%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Target	12 Laporan	537.200.000	25%	23%	50%	49%	<p>Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan</p>
			Realisasi			25%	15%	50%	38%	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Target	12 Dokumen	2.455.000.000	25%	39%	50%	76%	<p>Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan fasilitas Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan</p>
			Realisasi			25%	25%	50%	20%	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	Target	100 %	15.229.773.200	0%	0%	15%	99%	
			Realisasi	50%		0%	0%	0%	0%	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	1. Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas	Target	1.12 Dokumen 2.1504 Orang	15.229.773.200	0%	0%	15%	99%	

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Terlaksunanya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Realisasi	1. 0 Dokumen 2. 0 Orang		0%	0%	0%	0%	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Target	12 Dokumen	14.479.773.200	0%	0%	15%	100%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan.
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Target	1504 Orang		0%	0%	0%	9%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Koordinasi Di Bidang Pendidikan

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
	Perwakilan dan Partisi Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Target Realisasi	100 %	9.800.000.000	24%	77%	43%	99%	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan dan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Target Realisasi	50%	9.800.000.000	0%	26%	46%	45%	
			Target	1. 51 Dokumen 2. 400 Orang		24%	77%	43%	99%	
			Realisasi	1. 0 Dokumen 2. 0 Orang		0%	26%	48%	45%	
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Target Realisasi	51 Dokumen 0 Dokumen	9.000.000.000	25%	79%	45%	100%	Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Outcome / Output		APBD	TW I		TW II		Keterangan
			Target Realisasi	Target Realisasi		Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Target	400 Orang	800.000.000	0%	0%	0%	61%	<p>Capaian: Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal dan Target Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah sesuai dengan Target yg sudah ditetapkan.</p>
			Realisasi	0 Orang		0%	0%	0%	0%	
TOTAL			Target		46.615.263.760	14%	29%	34%	80%	
			Realisasi		10.210.059.677	8%	12%	28%	24%	

Untuk Tahun 2025, capaian kinerja IKU Badan Kesbangpol Kota Bekasi sampai dengan Triwulan II secara rinci ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target Tahun 2025	Target Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian (Realisasi Terhadap Target 2025)
1.	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	100%	50%	50%	50%
2.	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	BB (70-80)	-	-	-

Capaian Kinerja yang telah dicapai Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama Triwulan II (bulan Januari sampai dengan Juni) berupa Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut :

- Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dimana pada Target s/d Triwulan II yang sudah ditetapkan 50% dengan Realisasi 50% yang berarti Tingkat Capaian pada Triwulan II sebesar 100%;

$$\text{Persentase Kasus SARA yang diselesaikan} = \frac{\text{jml. Konflik SARA yang dilaporkan (n)}}{\text{jml. Konflik SARA yang ditangani (n)}} \times 100$$

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol ditargetkan pada Triwulan IV.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Sebagai kawasan perkotaan dengan heterogenitas, mobilitas masyarakat, dan dinamika sosial, ekonomi dan politik yang tinggi, permasalahan kota metropolitan yang terjadi Indonesia ini berlaku pula di Kota Bekasi. Permasalahan itu meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah. Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - 1) Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 - 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM, OKP;
 - 3) Masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka penciptaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - 4) Terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.
- Tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - 1) Letak geografis Kota Bekasi yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia antara kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional dalam bentuk seperti penyelundupan narkoba, human trafficking, pencurian dan aksi terorisme;
 - 2) Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran;

- 3) Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (*welleducated*) dengan penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah;
 - 4) Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Bekasi dari berbagai daerah dapat menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.
- Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;
 - 2) Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Bekasi;
 - 3) Menguatkan peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - 4) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Sekolah SMA/SMK sederajat dan Universitas, dalam melakukan upaya pengembangan program dan pemahaman pentingnya fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

- Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.
- 2) Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

- 3) Memungkinkan adanya sub kegiatan baru dalam mengoptimalkan ketercapainya tujuan dan sasaran OPD untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi disandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Laporan Keberadaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian RUMah Ibadah. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Laporan Orang Asing. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Laporan Orang asing ini berada di bawah

- tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 5) Fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama melalui kegiatan roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
 - 6) Pembinaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai politik. Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 7) Pembinaan bela negara, Penguatan ideologi Pancasila melalui tema kebangsaan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa;
 - 8) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kegiatan ini merupakan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi.
 - 9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Masyarakat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;

- 10) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
- 11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12) Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional, Badan Kesbangpol telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi;
- 13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2025 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

- 1) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perubahan Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 telah sesuai mengakomodir kebutuhan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang terdapat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Perubahan RPKD Kota Bekasi Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RPKD Tahun 2025			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Perubahan RPKD Tahun 2025			Catatan Penting	
			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot		1. Optimalisasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perantoran 4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	13.535.620.760	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot		1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perantoran 4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	13.535.620.760		
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	175.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	175.000.000	
8.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	
8.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.469.513.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Perentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.469.513.000	
8.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1064 Orang/bulan	10.454.513.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1064 Orang/bulan	10.454.513.000	
8.01.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	18 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	18 Laporan	15.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	500.000.000	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	200.000.000	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	52 Orang	250.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	52 Orang	250.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.075.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.075.000.000	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50.000.000	
8.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000	

Kode	Rencana Perubahan RKPD Tahun 2025				Rencana Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
8.01.01.2.06.009	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Kota Bekasi	4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 12 Laporan	6 350.000.000	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Kota Bekasi	9 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 12 Laporan	11 350.000.000	12
8.01.01.2.06.001	2 Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Kota Bekasi	4 Jumlah Dokumen Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	5 12 Dokumen	6 100.000.000	7 Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Kota Bekasi	9 Jumlah Dokumen Penyusunan Arsip Dinamis pada SKPD	10 12 Dokumen	11 100.000.000	
8.01.01.2.07	2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 100 %	6 300.000.000	7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 100 %	11 300.000.000	
8.01.01.2.07.006	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Kota Bekasi	4 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 23 Unit	6 300.000.000	7 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Kota Bekasi	9 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 23 Unit	11 300.000.000	
8.01.01.2.08	2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 100 %	6 516.007.760	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 100 %	11 516.007.760	
8.01.01.2.08.004	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Kota Bekasi	4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 12 Laporan	6 516.007.760	7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Kota Bekasi	9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 12 Laporan	11 516.007.760	
8.01.01.2.09	2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 100 %	6 500.000.000	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9 Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 100 %	11 500.000.000	
8.01.01.2.09.001	2 Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Kota Bekasi	4 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 22 Unit	6 400.000.000	7 Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Kota Bekasi	9 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 22 Unit	11 400.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100.000.000	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	2.812.569.800	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	2.812.569.800	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulasian Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan2. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. PembinaanKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan3. Terlaksananya pembinaan aktivitas kepanitiaan dan purnapaskibraka4. Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	1. 200 Orang2. 354 Dokumen4. 52 Orang	2.812.569.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulasian Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan2. Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembinaanKebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan3. Terlaksananya pembinaan aktivitas kepanitiaan dan purnapaskibraka4. Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	1. 200 Orang2. 354 Orang3. 2 Dokumen4. 52 Orang	2.812.569.800	
8.01.02.2.01.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	896.130.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	896.130.000	
8.01.02.2.01.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	354 Orang	580.940.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	354 Orang	580.940.500	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.0007	<p>Kebudayaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Pembinaan terhadap aktivitas kepartisipatifan dan Purnapaskibrak</p>	Kota Belas	Laporan Hasil Pembinaan, Laporan Hasil Pembinaan dan Purnapaskibrak	2 Dokumen	181.762.000	<p>Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Pembinaan terhadap aktivitas kepartisipatifan dan Purnapaskibrak</p>	Kota Belas	Laporan Hasil Pembinaan, Laporan Hasil Pembinaan dan Purnapaskibrak	2 Dokumen	181.762.000	
8.01.02.2.01.0008	<p>Pembentukan Pasdikbraka</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	Kota Belas	Jumlah Pasdikbraka	52 Orang	1.153.737.300	<p>Pembentukan Pasdikbraka</p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	Kota Belas	Jumlah Pasdikbraka	52 Orang	1.153.737.300	
8.01.05.2.01	<p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</p> <p>Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas</p> <p>Pencapaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Kota Belas	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1.400.000.000	<p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas</p> <p>Pencapaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Kota Belas	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1.400.000.000	
8.01.05.2.01.0003	<p>Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas</p> <p>Pencapaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Kota Belas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas <p>Pencapaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	1900 Orang	1.400.000.000	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas</p> <p>Pencapaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	Kota Belas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas <p>Pencapaian Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	1900 Orang	1.400.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Naricobica, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat dan Penghayan di Daerah					Naricobica, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat dan Penghayan di Daerah					
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	3.837.400.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	3.837.400.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Tetnis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Koordinasi Pemipinan Daerah Kabupaten/Kota	1. 250 Orang 2. 12 Laporan 3. 12 Dokumen	3.837.400.000	Perumusan Kebijakan Tetnis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Koordinasi Pemipinan Daerah Kabupaten/Kota	1. 250 Orang 2. 12 Laporan 3. 12 Dokumen	3.837.400.000	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan	Kota Belas	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan	250 Orang	845.200.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan	Kota Belas	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan	250 Orang	845.200.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.06.2.01.000 ⁵	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Belas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537.200.000	Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Belas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537.200.000	
8.01.06.2.01.000 ⁶	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Kota Belas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2.455.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Kota Belas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2.455.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Eksistensi Perubahan RKPD Tahun 2025				Cetakan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
8.01.03	Program Peningkatan Pemas Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %	18.229.773.200	Program Peningkatan Pemas Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %	18.229.773.200	
8.01.03.2.01	Perencanaan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah		1. Terusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah	1. 12 Dokumen 2. 1504 Orang	15.229.773.200	Perencanaan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah		1. Terusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah	1. 12 Dokumen 2. 1504 Orang	18.229.773.200	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah	Kota Belau	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah	12 Dokumen	14.479.773.200	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah	Kota Belau	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Kelembagaan Pemertabatan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemertabatan Situasi Politik di Daerah	12 Dokumen	14.479.773.200	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025				Catatan Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokas	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokas	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp)
8.01.03.2.01.004	<p>2</p> <p>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>3</p> <p>Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Binaan</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.004	<p>3</p> <p>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>4</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.04	<p>8</p> <p>Program Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakata</p>										
8.01.04.2.01	<p>8</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan</p>										

Kode	Rancangan Perubahan RPPD Tahun 2025					Rancangan Perubahan RPPD Tahun 2025					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokus 1	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokus 1	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3	4 Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	6	7 dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8	9 Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	11	12
8.01.04.2.01.000 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi 1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	51 Dokumen	9.000.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi 1	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	51 Dokumen	9.000.000.000	
8.01.04.2.01.000 3	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi 1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang	800.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi 1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang	800.000.000	
TOTAL					46.615.263.760					46.615.263.760	

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI**

Penyusunan Perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, didasarkan atas Rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dikaitkan dengan sasaran dan Target Kinerja Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, serta ditetapkan perubahan tujuan dan sasaran RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi

Indikator Tujuan 1 : Inklusi Sosial

Tujuan 2 : Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Indikator Tujuan 2 : Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Sasaran juga merupakan Penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara Terukur dan Nyata akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan adalah :

Sasaran 1 : Terwujudnya kewaspadaan dan kesadaran Masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah

Indikator Sasaran 1 : Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan

Sasaran 2 : Terwujudnya akuntabilitas pelayanan public pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Indikator Sasaran 2 : Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

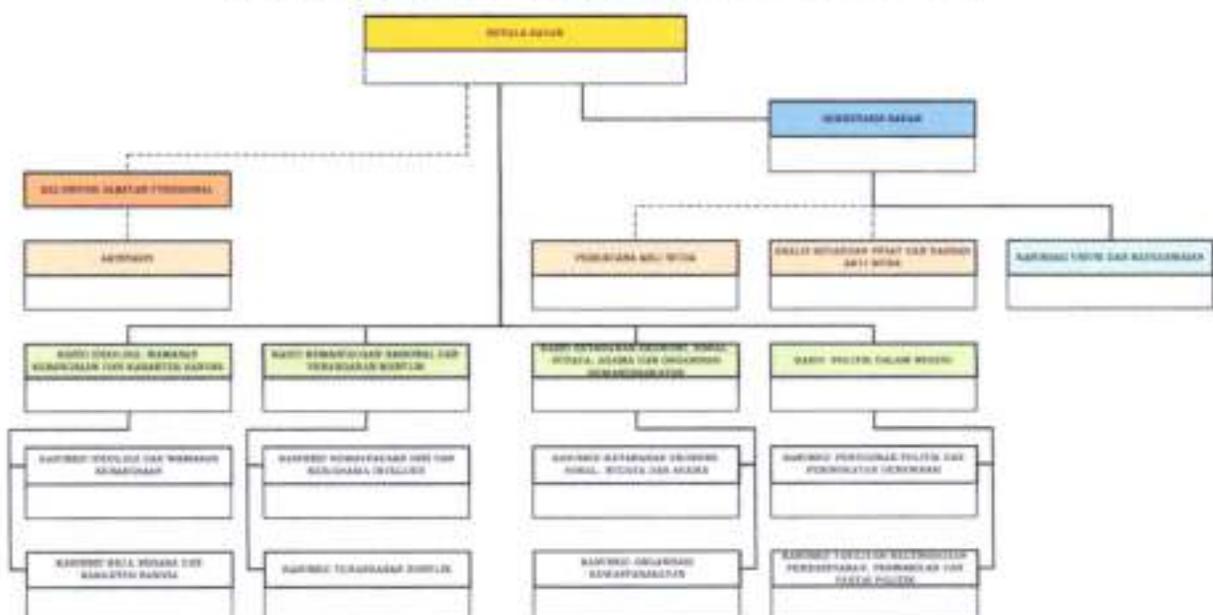
Berikut target kinerja Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi		Inklusi Sosial	6,1
	Terwujudnya kewaspadaan dan kesadaran Masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100 %
Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi		Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	67,83
	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan public pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	67,83

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagai Pihak Ketercapaian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)



Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 46 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data juni 2025)

NO	Esselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1	II	-	-	1	-	1	
2	III	1	-	2	1	4	
3	IV	6	2	-	-	8	
	Pangkat	ASN		TKK			
1	Jafung	-	3	-	-	3	
2	Staff	19	11	-	-	30	
Jumlah Total Esselon						46	

Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki Tugas yaitu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam rangka menjalankan Tugas tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan Kebijakan Teknis
Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b) Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Memberikan dukungan operasional untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah.
- c) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas
Melaksanakan pembinaan dan tugas-tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik, ketahanan seni dan budaya, organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kerukunan di wilayah Kota Bekasi, mulai dari penguatan ideologi negara hingga penanganan potensi konflik sosial.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan RENJA di Tahun anggaran 2025 melaksanakan 5 (*lima*) Program Urusan, 5 (*lima*) Kegiatan Urusan dengan 16 (*Enam belas*) Sub Kegiatan Urusan dan 1 (*satu*) Program Penunjang Urusan, 7 (*tujuh*) Kegiatan Penunjang Urusan dengan

12 (*Dua belas*) Sub Kegiatan dengan Total Keseluruhan yaitu 5 (*lima*) Program, 12 (*dua sebelas*) Kegiatan dan 28 (*Dua puluh delapan*) Sub Kegiatan.

Pada perubahan RENJA Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025, akan melaksanakan 5 (*lima*) program, yang terdiri dari 12 (*dua sebelas*) kegiatan dan 24 (*Dua puluh empat*) sub kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Hasil Pengerjaan dijelaskan pada Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai dengan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang di Rinci menurut Sumber Pendanaan bersumber dari APBD Kota Bekasi. Secara rinci berikut adalah perubahan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 :

Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode Rsk	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Sebelum	Sesudah	Peagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Tolak Ular	Target	Kebutuhan Dana/Peagu Indikatif (Rp.)	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan/ Kota Kabupaten/ Kota	1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi Peningkatan Sistem dan Prasarana Aparatur		1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	13.835.820.766	13.760.351.840		1. Perencanaan Keseluruhan Perencanaan Perangkat Daerah 2. Perencanaan Capaian Kinerja Keuangan 3. Penunjang Urusan 4. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah 5. Perencanaan Peningkatan Ruang Milik Daerah yang Amanah	1. 100% 2. 100% 3. 83,4% 4. 100%	13.963.744.000
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	179.000.000	136.640.000		Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat sesuai NSEK	3 Dokumen	75.000.000
8.01.01.2.01.00	Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	111.640.000	PAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000
8.01.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembinaan Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	10.469.513.000	10.596.517.000		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibuat sesuai NSEK	100%	11.468.744.000
8.01.01.2.02.00	Pertimbangan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN		1064 Orang/bulan	1142 Orang/bulan	10.494.513.000	10.581.517.000		Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan ASN	1316 Orang/bulan	11.453.744.000
8.01.01.2.02.00.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	18 Laporan	18 Laporan	15.000.000	15.000.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	900.000.000	230.000.000		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	20.000.000

Kode Rekr	Urusan / Bidang Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Lokasi Output & Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target Capaian Kinerja	Target
								Tolak Ukur	
8.01.01.2.05.00	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kebergangguan	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kebergangguan	Kota Bekasi	50 Paket	50 Paket	200.000.000	200.000.000		
8.01.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	10 Orang	6 Orang	50.000.000	50.000.000	10 Orang	20.000.000
8.01.01.2.05.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Kota Bekasi	52 Orang	0 Orang	250.000.000	-		
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1.075.000.000	1.038.700.000	0 Laporan	875.000.000
8.01.01.2.06.00	Penyediaan Bahan Logistik Karier	Jumlah Paket Bahan Logistik Karier yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	3 Paket	350.000.000	350.000.000	3 Paket	350.000.000
8.01.01.2.06.00	Penyediaan Barang Cetak dan Perawatan Prasarana	Jumlah Paket Barang Cetak dan Perawatan Prasarana yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Paket	6 Paket	75.000.000	38.700.000	12 Paket	75.000.000
8.01.01.2.06.00	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Prasarana	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Prasarana yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000
8.01.01.2.06.00	Facilities Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Perihal Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	150.000.000	12 Laporan	100.000.000
8.01.01.2.06.00	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	12 Laporan	250.000.000
8.01.01.2.06.00	Penatausahaan Asep Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinas pada SKPD	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000	12 Dokumen	50.000.000
8.01.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	300.000.000	-	1 Laporan	100.000.000
8.01.01.2.07.00	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	33 Unit	0 Unit	300.000.000	-	7 Unit	200.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	516.007.760	368.094.840		
8.01.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Karier SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Karier SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	6 Laporan	516.007.760	368.094.840		
8.01.01.3.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 %	100 %	500.000.000	495.400.000	3 Laporan	425.000.000

Kode Rekr	Urusan / Bidang / Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakirisan Maju Rencana Tahun 2026					
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolak Ukur	Target	Sumber Dana			
	Penertiban Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah											
8.01.01.2.09.00.01	Pengembangan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengkondisian serta Perawatan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	22 Unit	22 Unit	400.000.000	400.000.000	22 Unit	22 Unit	PAD	350.000.000		
8.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	25 Unit	25 Unit	100.000.000	100.000.000	25 Unit	25 Unit	PAD	75.000.000		
8.01.02	Program Pengadaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	100 %	2.813.569.000	1.653.737.300		100 %		1.885.699.300		
	Perencanaan Kebijakan, Tokoh dan Pemertanian	1. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1. 200 Orang2. 354 Orang3. 2 Dekumen4. 52 Orang		2.812.569.000	1.653.737.300		4 Sub Kegiatan		1.885.699.300		
8.01.02.2.01.00.03	Perencanaan Kebijakan, Tokoh dan Pemertanian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	200 Orang	85 Orang	896.130.000	300.000.000	200 Orang	200 Orang	PAD	50.000.000		
8.01.02.2.01.00.04	Pelaksanaan Kebijakan, Tokoh dan Pemertanian	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bekasi	85 Orang	0 Orang	900.000.000	-	85 Orang	90 Orang	PAD	300.000.000		

Kode Buk	Urusan / Bidang Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Target Ukur	Target
				Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
8.01.02.2.01.00.07	Pembinaan terhadap aktifitas kemitraan dan kerjasama dengan Pemangku/lembaga	Tunggal 10 dan Sejarah Kelengkapan Laporan Hasil Pembinaan Aktifitas Kemitraan dan Laporan Hasil Pembinaan Pemangku/lembaga	Kota Bekasi	2 Dokumen	0 Dokumen	181.763.000	-	3 Dokumen	181.763.000
8.01.02.2.01.00.08	Pembinaan: Pasatiraka	Jumlah Pasatiraka	Kota Bekasi	52 Orang	52 Orang	1.153.737.300	1.153.737.300	52 Orang	1.153.737.300
8.01.05	Program Pembiayaan dan Pengembangan Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Optimisasi pelaksanaan dan pengembangan kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 %	100 %	1.400.000.000	1.066.948.000	100 %	377.820.900
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Tolitik Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Kerjasama Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemertapan Penyelenggaraan Kerjasama, Fasilitas Kerjasama Umak Berbagi dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1900 Orang	1500 Orang	1.400.000.000	1.066.948.000	1 Sub Kegiatan	377.820.900
8.01.05.2.01.00.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemertapan Penyelenggaraan Kerjasama Umak Berbagi dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pemertapan Penyelenggaraan Kerjasama Umak Berbagi dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	1900 Orang	1500 Orang	1.400.000.000	1.066.948.000	400 Orang	377.820.900
8.01.06	Program Pengembangan Kerjasama Nasional dan Penilaian Penanganan Konflik Sosial	Optimalisasi Pelaksanaan Percepatan Konflik Daerah		100 %	100 %	3.837.400.000	3.326.440.000	100 %	3.037.300.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Tolitik dan Pemertapan Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Tertatasnya Kebijakan di Bidang Kerjasama Umak Berbagi dan Penghayat Kepercayaan Kerjasama Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.250 Orang 2. 12 Laporan 3. 12 Dokumen	1. 50 Orang 2. 12 Laporan 3. 12 Dokumen	3.837.400.000	3.326.440.000	3 Sub Kegiatan	2.637.200.000

Kode Sub	Urusan / Bidang Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output & Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			Target		
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target	
		1. Perbaikan Antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah 2. Terbakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah 3. Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	250 Orang	50 Orang	845.200.000	384.240.000	PAD	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	200.000.000
8.01.06.2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	537.300.000	337.300.000	PAD	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebudayaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	637.200.000
8.01.06.2.01.00 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	2.455.000.000	2.455.000.000	PAD	12 Dokumen	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000.000

Kode Mak	Urusan / Bidang Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Pembelian Meja Benerama Tahun 2026			
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Tolak Ukur	Target	
8.01.01	Program Peningkatan Pemas Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekas serta Budaya Politik	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah		100 %	100 %	18.229.773.200	9.937.882.000		100 %	Pembinaan Pendidikan Politik pada Kadat Partai Politik	10.287.880.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknik Dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Perencanaan, Perencanaan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik	1. Terwujudnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik di Daerah 2. Terkelompoknya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik di Daerah		1. 12 Dokumen 2. 1004 Orang	1. 11 Dokumen 2. 40 Orang	15.329.773.200	9.937.882.000		3 Sub Kegiatan	Jumlah with kegiatan Perumusan Kebijakan Teknik Dan Pemasanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Perencanaan, Perencanaan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik	10.287.880.000
8.01.03.2.01.01	Perumusan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Perencanaan, Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Perencanaan, Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Ekas Bekas	12 Dokumen	11 Dokumen	18.429.773.200	9.938.672.000	MAD	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Pengembangan Demokrasi, Fasilitas Perencanaan, Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9.937.880.000
8.01.03.2.01.06.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik	Ekas Bekas	1504 Orang	40 Orang	750.000.000	88.910.000	PAD	1004 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Ekas Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Perwakilan dan Partai Politik, Umam/Perwakilan Umam/Kepala Daerah, serta Pemasanaan Situasi Politik	350.000.000

Kode Ruk	Urusan / Bidang Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Rencana Tahun 2025 Pagu Indikatif (Rp)		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Target Ukur	Target	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
	Perencanaan dan Pusat Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemilihan Daerah, Serta Pemerintahan Sipil di Daerah	Perencanaan dan Pusat Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemerintahan Sipil di Daerah								
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Optimalisasi Penelitian Organisasi Kemasyarakatan			100 %	100 %	9.800.000.000	9.779.986.600	71 %	8.850.000.000
8.01.04.2.01	Perurusan Kebijakan Teknis dan Pencapaian Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Tersusunnya Kejelasan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			1. 51 Dokumen 2. 400 Orang	1. 52 Dokumen 2. 200 Orang	9.800.000.000	9.779.956.500	2 Sub Kegiatan	5.850.000.000
8.01.04.2.01.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Bekasi		51 Dokumen	52 Dokumen	9.000.000.000	9.200.000.000	1 Dokumen	8.750.000.000
8.01.04.2.01.00	Belaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi		400 Orang	200 Orang	800.000.000	479.936.300	100 Orang	100.000.000
TOTAL							46.615.363.760	38.849.913.640		34.002.144.300

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesesuaian ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung visi dan misi kepala daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil oleh Badan Kesbangpol harus terintegrasi dengan rencana strategis yang lebih besar, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dianggarkan secara terperinci. Proses penganggaran yang cermat ini bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif. Anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah urusan Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib. Kebersinambungan Rencana Kerja Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan pada program-program Badan Kesbangpol.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No. 54 Tahun 2010).

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan dokumen pembangunan lainnya. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Dalam komponen kegiatan ini, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol merupakan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Kesbangpol dalam rangka mendukung terwujudnya Misi Kota Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dibagi berdasarkan 2 (dua) bagian besar, yaitu Program Prioritas dan Program Rutin (Program yang ada di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah).

Program Prioritas Badan Kesbangpol adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Jumlah Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2025 setelah Renja Perubahan berjumlah 6 (Enam) program yang dijabarkan dalam 12 (Dua belas) kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) Sub Kegiatan. Kegiatan yang

dilaksanakan berlokasi di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Bekasi.

Rumusan program dan kegiatan Badan Kesbangpol seluruhnya telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk pagu indikatif masih terdapat beberapa perbedaan (dan perubahan) karena pagu anggaran yang terdapat pada Rancangan RKPD masih bersifat tentatif, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran di tingkat TAPD, dan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan akan ketercapaian indikator dan target kinerja kegiatan-kegiatan.

Keterkaitan antara dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting dalam mencapai sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap elemen dalam struktur ini saling mendukung dan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol, yang mencakup peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pemeliharaan persatuan serta kesatuan masyarakat di Kota Bekasi. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik berarti Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penyediaan layanan yang memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, merawat persatuan dan kesatuan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan. Ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong dialog antar kelompok, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui pelaksanaan yang terintegrasi, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat, sehingga menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik dan berdaya saing.

Penyusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja Perubahan mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

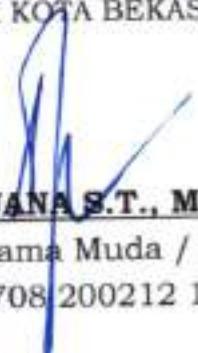
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Akhir Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan.

Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2025, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,



NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 19740708 200212 1 007

**USULAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 (MURNI)	PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 (PERUBAHAN)
1	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	Rp. 13,615,263,762,-	Rp. 12.765.351.840,-
2	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	Rp. 9.599.969.800,-	Rp. 6.615.891.800,-
3	BELANJA HIBAH (HIBAH BANTUAN PARTAI POLITIK, HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN HIBAH FASILITASI LEMBAGA PEMERINTAH)	Rp. 23,479,773,200,-	Rp. 19.168.672.000,-
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 44,917,630,760,-	RP. 38.549.915.640,-

Catatan :

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026, Badan Kesbangpol untuk tahun Anggaran 2025 termuat pagu anggaran berjumlah Rp. **38,530,484,600,-** akan tetapi setelah adanya beberapa kegiatan hasil penyesuaian kebijakan, setelah hasil desk rancangan awal pada pagu anggaran berubah (Pagu Murni) menjadi Rp. **44,917,630,760,-** dan pada Renja Perubahan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 setelah dilakukan pemecuaian pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 38.549.915.640,-**